

Warga Eropa Diminta Pakai Masker Selama Libur Natal

BERLIN (IM)- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyeru warga Eropa memakai masker selama seluruh keluarga berkumpul saat Natal. Menurut WHO, Eropa dalam risiko tinggi gelombang baru infeksi virus corona pada awal 2021, saat penyebaran wabah virus tetap tinggi.

Negara-negara di penjuru benua Eropa telah mendaftarkan ribuan kasus harian dalam ratusan kematian setiap hari. Jerman termasuk di antara negara yang memperketat pembatasan pada Rabu, dengan menutup sekolah dan bisnis yang tidak penting.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan vaksin Covid-19 pertama akan diizinkan digunakan dalam waktu sepekan. Von der Leyen mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa vaksin Pfizer/BioNTech yang dikembangkan di Jerman akan segera diluncurkan untuk blok Uni

Eropa, lebih dari sepekan lebih awal dari perkiraan semula.

Pernyataan dari kantor regional Eropa WHO mengatakan peningkatan pertemuan keluarga dan teman di Eropa selama musim liburan musim dingin membawa risiko signifikan peningkatan penularan Covid-19.

Ini mendesak individu, keluarga dan komunitas untuk memainkan peran mereka mencegah kebangkitan kembali kasus Covid-19. "Pertemuan keluarga harus diadakan di luar ruangan jika memungkinkan, dan jika di dalam ruangan peserta harus memakai masker dan mempraktikkan jarak sosial," ungkap WHO.

WHO juga meminta semua orang menghindari angkutan umum yang ramai, dan menyarankan agar negara-negara dengan resor ski mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan agar tidak berdesakan selama musim ski. ● gul



IDN/ANTARA

HARI PERTAMA MISA NOVENA DI MANILA - FILIPINA

Warga memakai masker pelindung dan pelindung wajah sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit virus korona (Covid-19) menghadiri hari pertama dari misa novena yang berlangsung selama sembilan hari di luar National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, di Paranaque City, Metro Manila, Filipina, Rabu (16/12).

Terjebak konflik, 2,3 Juta Anak di Ethiopia Terancam Kelaparan

Terancam kelaparan setelah akses bantuan kemanusiaan terputus menyusul berlanjutnya konflik senjata api.

MEKELLE (IM)- Sekitar 2,3 juta anak-anak di kawasan Tigray, Ethiopia, terancam kelaparan setelah akses bantuan kemanusiaan terputus menyusul berlanjutnya konflik senjata api.

Tentara Ethiopia dan pasukan bersenjata api dari Front Pembebasan Rakyat Tigray (Tigray People's Liberation Front/TPLF) kembali baku tembak di Tigray. Sebelumnya, pemerintah Ethiopia menyatakan perang sipil berakhir setelah tentara nasional berhasil memukul mundur pasukan TPLF dan menguasai Tigray.

Bagaimanapun, TPLF tidak menyerah dan terus melancarkan serangan balasan. Konflik ini terjadi sejak 4 November silam akibat adanya perubahan sistem pemerintahan. Di Ethiopia, meski menganut sistem demokrasi secara nasional, pemerintahan di beberapa kawasan dikuasai kelompok militer seperti TPLF di Tigray.

Perang sipil itu menimbulkan kekacauan sosial, politik, dan ekonomi di Tigray. Faktanya, banyak warga sipil yang mengungsi jauh dari perkampungan. Dengan kondisi yang tidak

menentu, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (UNICEF) telah menyalurkan bantuan kemanusiaan setidaknya sejak bulan lalu.

Namun, pekan ini, kendati sudah diberi izin pemerintah pusat Ethiopia, tim UNICEF tidak diperbolehkan memasuki Tigray mengingat situasinya sangat buruk. "Perlindungan terhadap anak-anak yang turut dalam evakuasi dan pengungsian harus menjadi prioritas. Mereka menjadi kelompok rentan," ungkap UNICEF.

UNICEF mendesak kedua pihak yang terlibat konflik untuk segera membuka akses bantuan dan menghormati petugas badan kemanusiaan. Sebab, pasokan makanan, obat-obatan, air, dan bahan pokok lainnya di wilayah pengungsian dikhawatirkan semakin menipis dan membahayakan pengungsi.

Konflik ini bergejolak setelah Perdana Menteri (PM) Ethiopia Abiy Ahmed berselisih dengan pemimpin TPLF terkait sistem pemerintahan. Pada November, sejumlah pangkalan militer tentara nasional Ethiopia dis-

serang kelompok militan TPLF di Tigray. Situasi kian memanas setelah Ethiopia melancarkan operasi militer.

Tim UNICEF juga pernah ditembak dan ditahan tentara Ethiopia karena mengabaikan peringatan dan pemeriksaan cek poin. "Peristiwa ini terjadi karena tim UNICEF menerobos masuk tanpa mengindahkan peringatan otoritas agar tidak memasuki wilayah tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) PM, Redwan Hussein, dikutip BBC.

Tentara Eritrea sempat dikabarkan memasuki Tigray untuk menyelamatkan warga mereka yang terjebak di sana. Namun, laporan itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Ethiopia dan Eritrea juga membantu menggabungkan kekuatan militer untuk menumbangkan TPLF mengingat isunya domestik.

Namun, sebagian warga Eritrea masih tinggal di Tigray setelah mengungsi dari Eritrea akibat krisis politik dan militer. Saat ini, mereka kembali terjebak dalam perang saudara. Tim dari UNICEF juga masih menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi asal Eritrea di Tigray, termasuk sebelum terjadi perang.

Ahmed menjadi pemimpin Ethiopia pertama yang berhasil mengakhiri konflik dengan Eritrea. Capaian perdamaian tersebut

bahkan mengantarkannya meraih Nobel Perdamaian pada 2019. Namun, beberapa kritikus menilai kesepakatan itu hanya menjadi pakta keamanan sehingga Eritrea dapat membantu Ethiopia.

Seorang agen intelijen Amerika Serikat (AS) yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan tentara Eritrea ada di Tigray untuk membantu Ethiopia memberantas TPLF. "Hal itu sudah tidak diragukan lagi. Tentara TPLF juga mengetahui hal ini sehingga mereka menyerang wilayah Eritrea," katanya kepada Reuters.

Tentara Ethiopia berhasil mengambil alih ibu kota Tigray, Mekelle, dari TPLF pada 28 November lalu. Namun, pertempuran masih terjadi di wilayah lain, termasuk di wilayah gunung-gunung batu. "Masih ada tentara atau pasukan khusus TPLF yang berkeliaran dan melakukan serangan secara gerilya," ujar Redwan.

Sebelum menjadi partai politik, TPLF merupakan kelompok gerilyawan. TPLF memimpin koalisi Front Demokratik Revolusi Rakyat Ethiopia (EPRDF) dari 1989 untuk menggulingkan partai komunis Rakyat Demokrasi Republik Ethiopia (PDRE). Sejak saat itu, TPLF diberi kewenangan memegang pemerintahan di Tigray.

Kedudukan TPLF di Tigray terancam setelah Ahmed melaku-

kan reformasi pemerintahan secara besar-besaran sejak terpilih pada 2018. Dia berharap sistem demokrasi dapat diterapkan secara utuh dan nasional. Selain itu, masyarakat berharap Ahmed dapat menghapus korupsi dan represi yang banyak terjadi.

Keputusan Ahmed mengizinkan tentara nasional menuju Tigray juga mendapat dukungan penuh dari sebagian masyarakat Ethiopia. Namun, sebagai peraih Nobel Perdamaian, aksi tersebut mendapat kritikan dari akademisi Eropa. Mereka bahkan menilai Ahmed tidak ada bedanya dengan pemimpin yang lain.

Namun, pendukung Ahmed mengatakan pemimpin dan masyarakat Ethiopia tidak semestinya diam jika diserang. Apalagi, aksi militer TPLF terjadi setelah Ahmed membuka ruang diskusi. Menyehle Meseret dari University of Gondar mengatakan keputusan Ahmed untuk melindungi kedaulatan negara sudah tepat.

"Negeri ini sedang terancam oleh pasukan bersenjata. TPLF telah melakukan serangan secara terang-terangan. Tidak ada negara yang akan menoleransi hal seperti itu, termasuk negara-negara di Eropa. Saya juga melihat Ahmed merupakan pemimpin yang sabar, toleransi, dan kesempatan berdiskusi", kata Meseret. ● tom

Hizbullah Gunakan Anggaran Kesehatan Lebanon untuk Danai Lembaganya

BEIRUT (IM) - Hizbullah telah menggunakan anggaran kesehatan Lebanon untuk mendanai institusi medisnya sendiri secara tidak proporsional. Hal itu terungkap dalam dokumen pemerintahan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Lebanon yang saat ini dijalankan oleh menteri yang pro-Hizbullah Hamad Hasan.

Dokumen resmi itu menunjukkan alokasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit umum dan swasta, yang didatangkan oleh pengurus pemerintah Lebanon sebelum pengunduran dirinya Agustus lalu hanya empat hari setelah ledakan pelabuhan di Beirut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan Lebanon menerima anggaran lembaga medis yang disponsori Hizbullah.

Di pemerintahan baru-baru ini, Hizbullah mulai menuntut lebih banyak portofolio kementerian yang memiliki akses ke layanan dan pendanaan negara seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.

Alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh Kementerian Kesehatan ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Lebanon tentang penggunaan kementerian oleh Hizbullah untuk mendanai dan mendukung ekonomi paralnya sendiri.

Awal tahun ini, Kementerian Kesehatan juga dikritik karena mencoba mengganti obat yang diproduksi di Eropa dengan alternatif yang diproduksi di Iran.

Dokumen yang dilihat oleh Al Arabiya menunjukkan bahwa Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang tidak terkena dampak dari ledakan pelabuhan Beirut dan berafiliasi dengan Hizbullah, menerima USD9,7 juta pada anggaran resmi yang dipatok negara. Jumlah itu meningkat dari USD3,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran yang sama tidak ditingkatkan untuk rumah sakit terkemuka seperti American University, Roum, dan Hotel Dieu meskipun mereka mendapatkan tantangan menyusul dampak ledakan Beirut pada bulan Agustus lalu dan menjadi rumah sakit besar yang menerima dan merawat jumlah korban tewas serta terluka.

Dokumen tersebut menunjukkan alokasi total untuk ketiga rumah sakit terkemuka itu tidak melebihi USD10,8 juta, dibandingkan dengan USD9,7 juta untuk satu rumah sakit yang disponsori oleh Hizbullah.

"Skandal pembagian plafon keuangan tidak terbatas pada Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang diklasifikasikan sebagai kategori pertama," ungkap sebuah sumber dari Kementerian Kesehatan.

Sebaliknya, itu termasuk meningkatkan alokasi anggaran rumah sakit, institusi, dan klinik Hizbullah yang dijalankan oleh otoritas kesehatannya, termasuk institusi yang baru didirikan, dengan peningkatan keseluruhan sebesar 14 miliar pound Lebanon (\$9,2 juta)," sumber itu menambahkan, yang minta identitasnya dirahasiakan, seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (17/12).

Al Arabiya kemudian menghubungi Dr. Hadi Mourad, yang mengatakan bahwa penambahan anggaran besar-besaran hanya menargetkan institusi medis Hizbullah di seluruh negeri.

"Selain itu, Kementerian Kesehatan menambahkan 15 institusi medis baru yang sebelumnya tidak didanai oleh kementerian untuk pertama kalinya. Penambahan tersebut tidak menasar wilayah mayoritas Syiah, misalnya RSUD Baalbek yang minim bantuan, meski sangat penting bagi wilayah tersebut. Lembaga lain yang disponsori oleh gerakan Amal tidak menerima bonus apa pun dari kementerian. Bonus ini jelas hanya menargetkan lembaga yang disponsori Hizbullah," ungkap Mourad. "Rumah sakit Karantina, yang hancur total oleh ledakan Pelabuhan Beirut, hanya menerima 75 juta Lira Lebanon," tambahnya.

Mourad mengatakan bahwa menteri kesehatan sebelumnya, Ghassan Hasbani, menetapkan formula yang tepat untuk bonus tersebut berdasarkan jumlah tempat tidur di setiap rumah sakit dan signifikansinya di sektor medis negara. "Pemerintah Lebanon pada saat itu menolak formula Hasbani karena mereka ingin tetap mengikuti divisi kuota sektarian yang korup yang biasa dilakukan oleh kelas politik," menurut Mourad. ● gul

Pemerintah Nigeria Kantongi Lokasi Ratusan Anak yang Diculik Boko Haram

ABUJA (IM) - Otoritas Nigeria telah mengetahui lokasi 337 siswa yang diculik oleh kelompok Boko Haram dari sebuah sekolah di barat laut Nigeria beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan gubernur negara bagian Aminu Bello Masari.

Masari mengatakan pembicaraan sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan mereka dengan secara aman. "Kami tidak mendengar tuntutan konkret, tapi kami akan memastikan bahwa anak-anak akan kembali ke rumah," katanya.

"Semua area telah diamankan tetapi pasukan keamanan di sini tidak akan menembak karena kami ingin memastikan bahwa kami tidak mendapatkan kerusakan tambahan," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (17/12).

Polisi setempat mengatakan sejumlah besar pelaku penyerangan yang mengendarai sepeda motor menyerpag Sekolah Menengah Sains Pemerintah khusus laki-laki di Kankara, Negara Bagian Katsina, pekan lalu. Mereka mengatakan serangan itu mungkin merupakan upaya penculikan untuk mendapatkan tebusan.

Ada berbagai perkiraan jumlah anak yang diculik dari sekolah. Pejabat pemerintah mengatakan sulit untuk melacak angka secara akurat, karena beberapa anak melarikan diri selama serangan itu dan yang lainnya melarikan diri dan kembali ke desa serta ke sekolah selama

akhir pekan. "Kami (pemerintah) pada akhirnya bertanggung jawab," tegas Masari.

Seorang pria yang mengaku sebagai pemimpin Boko Haram mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok teror itu bertanggung jawab atas penculikan tersebut, menurut pesan audio singkat yang dibagikan dengan media Nigeria dan ditinjau oleh CNN. "Saya Abubakar Shekau dan saudara-saudara kami berada di belakang penculikan di Katsina," kata pria dalam rekaman itu. Shekau adalah pemimpin salah satu faksi Boko Haram.

Masari tidak sepenuhnya menampik catatan suara itu, tetapi memperingatkan bahwa diperlukan bukti yang lebih konkret sebelum dapat dipastikan bahwa Boko Haram terlibat. Para penculik belum mengajukan permintaan secara langsung, namun seorang anak guru yang termasuk di antara yang diculik menghubungi ayahnya. Dia hanya mengeluh tentang angkatan udara yang terbang di atas kepala dan menyebutkan bahwa mereka mungkin membutuhkan uang.

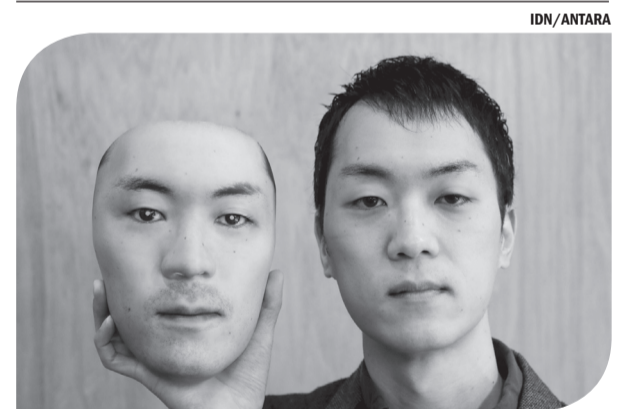
Ketika ditanya apakah dia akan membayar uang tebusan, Masari mengatakan itu bukan kebijakan pemerintah Nigeria untuk melakukannya. "Kami akan mencari cara lain untuk mengamankan nyawa dan bebe-

basan anak-anak," tambahnya. Penculikan tersebut berada di luar wilayah kegiatan Boko Haram yang biasa. Operasi mereka umumnya terfokus di timur laut negara itu, meskipun analisis keamanan yakin bahwa jangkauan mereka telah bergeser setelah tindakan keras keamanan di wilayah itu.

Ada banyak penculikan untuk mendapatkan tebusan di Negara Bagian Katsina dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak dalam skala ini. Beberapa saksi mengatakan kepada CNN bahwa mereka yang menargetkan sekolah tersebut adalah pria bersenjata Fulani, kelompok etnis yang terlibat dalam penculikan dan aktivitas kriminal di daerah tersebut.

Faksi Shekau dari Boko Haram berada di balik penculikan hampir 300 siswa di Chibok pada 2014. Penahanan mereka berlangsung bertahun-tahun dan banyak dari anak-anak itu tidak pernah dikembalikan setelah pembebasan yang dingoasiasikan.

Pada tahun 2018, kelompok Boko Haram yang memisahkan diri dari ISWAP menculik lebih dari 100 gadis di Dapchi. Semua kecuali satu dibebaskan beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi. Meskipun ini adalah contoh yang paling terkenal, Boko Haram telah menculik lebih dari 1.000 anak sejak 2013, menurut UNICEF. ● ans



IDN/ANTARA

MASKER PELINDUNG

Shuhei Okawara, 30 tahun, pemilik toko topeng Kamenya Omote, memperlihatkan masker pelindung super-realistik berdasarkan wajahnya, dibuat dengan teknologi cetak 3D, di Tokyo, Jepang, Rabu (16/12).

Mantan Presiden Swiss

Meninggal Dunia Akibat Covid-19

BERN (IM) - Mantan presiden Swiss Flavio Cotti, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri negara itu, meninggal dunia pada usia 81 tahun. Cotti meninggal akibat virus korona.

"Dengan sangat sedih saya mengetahui kematian Flavio Cotti," kata Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis di Twitter.

Semangat politiknya akan selalu hadir di kementerian luar negeri," tambahnya seperti dikutip dari France24, Kamis (17/12). Menurut harian regional di wilayah Ticino yang berbahasa Italia di Swiss, yang merupakan pihak pertama yang melaporkan kematian Cotti, ia meninggal pada Rabu sore di rumah sakit Locarno menyusul komplikasi akibat virus korona.

Cotti, yang juga merupakan seorang pengacara, naik pangkat di Partai Demokrat Kristen di

Ticino, sebelum menghabiskan 12 tahun di pemerintahan nasional di Bern, dari tahun 1987 hingga 1999.

Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri, dan dua kali menjabat sebagai presiden, dalam sistem pemerintahan Swiss semua menteri pemerintah memegang kursi kepresidenan secara bergilir satu tahun.

Dia dikenal karena telah bekerja untuk mendekatkan Swiss ke organisasi internasional, dan melobi negaranya untuk bergabung dengan PBB, sesuatu yang akhirnya dilakukan tiga tahun setelah dia meninggalkan jabatannya.

Dia juga bekerja untuk Jenewa agar tetap menjadi tuan rumah markas PBB di Eropa, dan membantu memastikan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang didirikan pada tahun 1995, berpusat di kota tersebut. ● gul



IDN/ANTARA

MUSIM SALJU DI NEW YORK

Seorang pekerja membersihkan salju saat salju mulai turun di Times Square selama Nor'easter, di tengah pandemi virus corona (Covid-19), di kawasan Manhattan, Kota New York, New York, Amerika Serikat, Rabu (16/12).